

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mewujudkan Sekolah Merdeka Belajar Di Sd Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

Sodik Casudin¹, Rissa Widyasih², Sri Hidayanti³, Sati⁴

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon¹²³⁴

Email: sodikasudin@gmail.com

Abstract

This research is motivated because education has the task of preparing human resources for development. The pace of development steps is always pursued in tune with the demands of the times. The development of the times always raises new challenges, one of which is in improving the quality of education. To that end, Makarim (Kemendikbud, 2019) stipulates four main programs of "free learning" education policies, namely the National Standardized School Examination (USBN), National Examination (UN), Learning Implementation Plan (RPP), and the New Student Admission Regulation (PPDB).) Zoning, is expected to improve the quality of education. One of the efforts, namely the implementation of School-Based Management (SBM). School-Based Management (SBM) is a model of education reform in an effort to improve the quality of education by providing broad autonomy at the school level. The purpose of this study, namely to determine the implementation of School-Based Management (SBM) in realizing independent learning schools at SD Negeri 2 Pegagan, Palimanan District, Cirebon Regency. This research method, namely qualitative research methods. The results of this study, namely the implementation of SBM in schools, the implementation of school autonomy, the involvement of teachers and stakeholders in the development of educational institutions, and good cooperation between schools, government or private institutions at local, national, and international levels.

Keywords: *School-Based Management (SBM) and Independent Learning.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, salah satunya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, Makarim (Kemendikbud, 2019) menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "merdeka belajar", yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upayanya, yaitu dengan adanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model reformasi pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi luas di tingkat sekolah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mewujudkan sekolah merdeka belajar di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu implementasi MBS di sekolah, implementasi otonomi sekolah, keterlibatan guru dan *stakeholder* dalam pengembangan lembaga pendidikan, dan kerjasama antar sekolah, instansi pemerintah atau swasta tingkat lokal, nasional, dan internasional sudah baik.

Kata Kunci: *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Merdeka Belajar.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, salah satunya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, Makarim (Kemendikbud, 2019) menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "merdeka belajar" sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Ujian Nasional (UN) akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) akan disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), akan tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima peserta didik minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Dengan adanya empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upayanya, yaitu dengan adanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu bentuk restrukturisasi dan desentralisasi sekolah dengan mengubah sistem sekolah dalam melakukannya (Tatang, 2012: 261). MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah serta pelibatan masyarakat. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Afandi, 2017 dalam Batubara dan Ariani, 2017: 453).

Menurut Dirjen Dikdasmen, 2001 (Muhammad dan Rahman, 2017: 612), MBS merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam rangka Kebijakan Pendidikan Nasional.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa MBS adalah model reformasi pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi luas di tingkat sekolah.

MBS bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu sekolah karena fokus penekanannya pada ketiga komponen sistem (*input-proses-output*) dari pada pendekatan *input* yang dianut selama ini, meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, sebagai konsekuensi keterlibatan masyarakat dalam proses persekolahan (Arismunandar., Nurhikmah., dan Achmad, 2016: 33).

Menurut Oswald, 1995 (Arismunandar., Nurhikmah., dan Achmad, 2016: 33-34), manfaat penerapan MBS sebagai berikut:

1. MBS memberikan program pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik karena sumber daya akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
2. MBS meningkatkan kualitas keputusan lebih tinggi karena dibuat oleh kelompok ketimbang individu.
2. MBS meningkatkan komunikasi di antara *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) meliputi komite sekolah, pengawas/pembina, kepala sekolah, guru, orang tua, anggota masyarakat, dan peserta didik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam mewujudkan sekolah merdeka belajar di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010: 15). Tempat penelitian ini, yaitu SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2010: 337).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi pendidikan dapat diupayakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan prinsip otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai mutu pendidikan (Danim, 2006 dalam Winoto, 2020: 9). Adapun beberapa alasan implementasi MBS sebagai berikut (Achadah, 2019: 84-85):

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya. Sehingga, sekolah tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan sekolah.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan fungsi perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang masalah pendidikan masing-masing pada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga ia berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
7. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah.
8. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat.

Berdasarkan hasil *studi visit* manajemen sekolah di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Hasil *Studi Visit* Manajemen Sekolah di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

No	Instrumen	Hasil <i>Studi Visit</i>
1	Implementasi MBS di Sekolah	Implementasi MBS di sekolah pada hakikatnya pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Semua kebijakan-kebijakan sekolah harus berdasarkan dengan kebutuhan sekolah. Implementasi MBS mengharuskan sekolah menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan program kegiatan. Dalam membuat RPS dan program kegiatan, sekolah harus mampu melakukan evaluasi diri untuk melihat kekuatan (<i>strengths</i>), kelemahan (<i>weaknesses</i>), peluang (<i>opportunities</i>), dan ancaman (<i>threats</i>) yang dalam bahasa perencanaan sering disebut Analisis <i>SWOT</i> . Analisis <i>SWOT</i> harus mendasari penyusunan RPS dan program kegiatan sehingga dapat diimplementasikan.
2	Implementasi Otonomi Sekolah	Implementasi otonomi sekolah mutlak diberikan dengan MBS untuk mengambil keputusan-keputusan konkrit dalam mengelola pendidikan dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa urusan yang secara langsung dapat diserahkan kepada sekolah sebagai perwujudan dari otonomi sekolah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. b. Memiliki kewenangan dalam penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki. c. Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. b. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. c. Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten. d. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. b. g. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

3	Keterlibatan Guru dan <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan	Guru sebagai <i>stakeholder</i> pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari Pemerintah. Peran serta masyarakat dengan komite sekolah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Peran serta orangtua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan orangtua. Orangtua merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan MBS. MBS dapat berjalan dengan baik apabila komite sekolah diberdayakan secara optimal. Komite sekolah dibentuk sebagai mitra sekolah dalam mengembangkan diri menuju peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya komite sekolah bekerja berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.
4	Kerjasama antar Sekolah, Instansi Pemerintah atau Swasta Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional	Setiap lembaga harus memperkuat dirinya dengan mitra kerja. Sekolah dapat memanfaatkan berbagai sumber yang ada pada orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dapat menjadikan keluarga dan masyarakat sebagai jalinan mitra kerja sekaligus. Kerjasama tersebut untuk kelancaran pendidikan di sekolah dan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam usaha memperbaiki sekolah. Kemitraan dalam pendidikan merupakan kunci bagi keberhasilan pengelolaan sekolah saat ini, dimana dapat dikatakan sebagai era kemitraan dan kolaborasi.

Dari Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mewujudkan sekolah merdeka belajar di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sudah baik. Implementasi MBS di sekolah dalam membuat RPS dan program kegiatan, sekolah harus mampu melakukan evaluasi diri untuk melihat kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dalam bahasa perencanaan sering disebut Analisis *SWOT*. Implementasi otonomi sekolah mutlak diberikan dengan MBS untuk mengambil keputusan-keputusan konkrit dalam mengelola pendidikan dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan guru dan *stakeholder* dalam pengembangan lembaga pendidikan tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan. Kerjasama antar sekolah, instansi pemerintah atau swasta tingkat lokal, nasional, dan internasional

untuk kelancaran pendidikan di sekolah dan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam usaha memperbaiki sekolah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mewujudkan sekolah merdeka belajar di SD Negeri 2 Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sudah baik. Implementasi MBS di sekolah dalam membuat RPS dan program kegiatan, sekolah harus mampu melakukan evaluasi diri untuk melihat kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dalam bahasa perencanaan sering disebut Analisis *SWOT*. Implementasi otonomi sekolah mutlak diberikan dengan MBS untuk mengambil keputusan-keputusan konkrit dalam mengelola pendidikan dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan guru dan *stakeholder* dalam pengembangan lembaga pendidikan tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan. Kerjasama antar sekolah, instansi pemerintah atau swasta tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kelancaran pendidikan di sekolah dan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam usaha memperbaiki sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadah, A. (2019). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4, 2. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tarbiyatuna/article/view/3788> Diunduh pada tanggal 20 Juni 2022.
- Arismunandar., Nurhikmah., dan Achmad, WKS. (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Batubara, H.H., dan Ariani, D.N. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Sungai Miai 5 dan SDN Surgi Mufti 4 di Banjarmasin. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3, 2. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/view/1196> Diunduh pada tanggal 13 Juni 2022.
- Kemendikbud. (2019). *Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2022.
- Muhammad, S., dan Rahman, M. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 15, 1. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/279/202> Diunduh pada tanggal 13 Juni 2022.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tatang, S. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Winoto, S. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi dalam Aktivitas Manajerial di Sekolah atau Madrasah*. Yogyakarta: LKiS.